

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, bahwa wacana politik dinasti terkait dinasti yang dibangun oleh presiden Jokowi sudah mulai disuarakan oleh media sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sebagai Cawapres. Tidak berakhir sampai disitu, berlanjut pula wacana politik dinasti ini setelah berakhirnya kontestasi politik Pilpres yakni pada proses menuju Pilkada. Menjelang Pilkada Serentak 2024 ternyata media masih gencar-gencarnya mengangkat isu politik dinasti ini, terkhusus terfokus terkait wacana politik dinasti anggota keluarga presiden Jokowi yang di isukan akan naik mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis wacana pada teks berita dengan topik politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2024 pada media-media pemberitaan seperti *Kompas.com*, *Tribun News.com*, *detik.com*, dan *Medcom.id* dengan edisi Maret - Agustus 2024 dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang terdiri dari dimensi mikrostruktural, dimensi mesostruktural, dan dimensi makrostruktural. Terdapat 10 berita yang akan penulis ambil dan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini dan tentunya topik pemberitaan yang diambil adalah isu politik dinasti menjelang Pilkada Serentak 2024. Berikut ini adalah data daftar tabel berita yang memuat nama media, tanggal terbit, dan judul berita tentang topik politik dinasti menjelang Pilkada Serentak tahun 2024.

Tabel 4.1 Daftar Data Judul Berita Penelitian

No.	Judul Berita	Media - Tanggal Terbit
1.	Wacana Anak – Menantu Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat “Politik Dinasti”	<i>Kompas.com</i> – 15 Maret 2024
2.	Usulan PAN Duetkan Ridwan Kamil-Kaesang Dan Dinasti Politik Yang Akan Terus Lestari	<i>Kompas.com</i> – 19 Juni 2024
3.	Isu Politik Dinasti Jokowi, Pakar: Konstitusi Tidak Dirancang Untuk Keluarga	<i>Kompas.com</i> – 15 Maret 2024
4.	Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi	<i>Kompas.com</i> – 1 Juni 2024
5.	Isu Dinasti Politik Jokowi di Balik Wacana Erina Gudono Maju Pilkada, Demokrat: Itu Persepsi Publik	<i>Tribun News.com</i> – 15 Maret 2024
6.	Sindiran Pengamat Kepada Jokowi: Beliau Presiden Tersukses Membangun Dinasti Politik Pascareformasi	<i>Tribun News.com</i> – 13 Maret 2024
7.	Banyak Parpol Dukung Bobby Nasution, Grace Natalie: Isu Dinasti Dilontarkan Mereka Yang Takut Bertarung	<i>Kompas.com</i> – 12 Juli 2024
8.	Tifatul Ungkap Alasan PKS Usung Bobby di Sumut, Tepis Dukung Politik Dinasti	<i>Detik.com</i> – 07 Agustus 2024
9.	Anak Dan Menantu Masuk Bursa Pilkada, Jokowi Terus Perluas Dinasti Politik	<i>Medcom.id</i> – 15 Agustus 2024
10.	Politik Dinasti Jokowi Dinilai Bakal Berlanjut Ke Kaesang dan Istrinya	<i>Medcom.id</i> – 17 Maret 2024

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan ditemukan data penelitian pada pemberitaan media online *Kompas.com*, *Tribun News*, *Detik.com*, dan *Med.com* terkait wacana isu politik dinasti yang akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Ditemukan sebanyak 7 berita yang membahas khusus kritik politik dinasti dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia, sebanyak 4 berita yang fokus pada tokoh tertentu seperti Gibran, Kaesang, Bobby, dan Erina serta peran mereka dalam memperluas dinasti politik keluarga Jokowi, sebanyak 4 berita yang menunjukkan sikap dukungannya terhadap pencalonan keluarga Jokowi dalam pemilihan daerah (Pilkada), dan sebanyak 2 beritayang fokus membahas regulasi terkait usia calon kepala daerah. Berikut pemaparan dari hasil penelitiannya:

4.1.1 Dimensi Tekstual (Mikrostruktural) dalam Berita Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Tabel 4.2 Data Analisis Teks

Berita 1			
Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Darurat, merajalela, tidak wajar, transaksi	4	Pemilihan kata pada berita menekankan urgensi, bahaya, dan ketidakwajaran situasi.
Kosakata	Kolusi, nepotisme, dinasti politik, oligarki	4	Istilah yang terkait dengan dampak negatif dari politik dinasti.
Eelemen Retoris	“Kita sudah berada dalam kondisi darurat politik dinasti”	1	Gaya bahasa hiperbola, propaganda, dan penekanan untuk memperkuat argumen narasumber terhadap kesan bahaya dari politik dinasti.
Metafora	Merajalela	1	Perumpamaan yang digunakan untuk menggambarkan dinasti politik sebagai sesuatu yang mengancam dan menyebar luas.
Berita 2			
Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Kurang tepat, kalkulasi, pragmatis, melestarikan, gimmick	5	Diksi yang digunakan menunjukkan adanya penilaian negatif terhadap usulan PAN. Penggunaan kata “kurang tepat” dan “gimmick” memberikan kesan bahwa langkah yang diambil tidak serius dan terkesan manipulatif. Diksi lain seperti “kalkulasi” dan “pragmatis” mengarah pada pertimbangan yang fokus pada kekuasaan semata.
Kosakata	Dinasti politik, anak kandung reformasi, kekuatan reformis	3	Kosakata ini memperkuat narasi negatif terhadap kebencian dinasti politik yang memicu dengan sebuah ketidakadilan atau pengingkaran terhadap prinsip-prinsip reformasi.

			Penyebutan “anak kandung reformasi” menandakan bahwa PAN, yang dianggap sebagai kekuatan reformis, kini berubah haluan.
Elemen Retoris	Hanya demi kekuasaan?	1	Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan retorik yang memberikan ruang untuk kritik terhadap motif yang ada dibalik isu tersebut. Pengutipan argument dari Zaki Mubarak menambah bobot narasi dan mempertajam sisi kritik terhadap langkah dari PAN.
Metafora	Dinasti politik, <i>game charger</i> , <i>gimmick</i>	3	Metafora “politik dinasti” menggambarkan kekuasaan yang terus-menerus di pertahankan dalam keluarga, yang bercitra negatif / tidak demokratis. “ <i>Game charger</i> ” memberikan kesan bahwa keputusan tersebut bisa menjadi titik balik dalam Pilkada Jakarta, namun di kemas dengan harapan tinggi. “ <i>Gimmick</i> ” menunjukkan bahwa tindakan tersebut hanyalah sebuah strategi politik tanpa substansi.

Berita 3

Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Tidak sesuai, omong kosong, prestasi, dinasti politik, bahaya, lingkaran kekuasaan.	6	Diksi yang digunakan dalam teks berita ini digunakan untuk mempertegas ketidaksetujuan terhadap praktik politik dinasti yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi,
Kosakata	Konstitusi, keluarga, dinasti politik, lingkaran kekuasaan, partai politik pendukung	5	Kosakata ini memperkuat argument bahwa praktik politik dinasti dianggap bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dan demokrasi yang seharusnya

			mengatur secara adil.
Elemen Retoris	-“Saya pikir omong kosong kalau kita bicara prestasi Gibran” -... konstitusi tidakdirancang untuk keluarga	2	Kedua elemen ini mengandung retorika untuk memperkuat kritik terhadap politisasi keluarga presiden Jokowi. Ungkapan “omong kosong” ditujukan kepada prestasi Gibran yang dianggap masih belum layak, dan ungkapan “...konstitusi tidak dirancang untuk keluarga” menunjukan perhatian ketidakadilan dan potensi menutupi kekuasaan dalam praktik politik dinasti.
Metafora	Lingkaran kekuasaan	1	Menggambarkan kelompok yang memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik, yang dalam hal ini adalah keluarga Presiden Jokowi, sementara kelompok yang lain terpinggirkan.

Berita 4

Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Karpet merah, dinasti Jokowi, janggal, mengadana	4	“Karpet merah” merujuk kepada keputusan yang dianggap mempermudah jalan bagi keluarga Jokowi. “Dinasti Jokowi” memberikan kesan negatif terhadap konsentrasi kekuasaan dalam keluarga tertentu. Kata “janggal” dan “mengadana” mengungkapkan ketidakpercayaan dan kritik terhadap dasar hukum putusan ini.
Kosakata	Tentakel, musyawarah, intervensi	3	"Tentakel" menggambarkan ekspansi pengaruh politik Jokowi yang meluas. "Deliberasi" mengacu pada proses diskusi mendalam yang seharusnya ada dalam pengambilan keputusan hukum, namun dianggap kurang matang.

			"Intervensi" menunjukkan dugaan campur tangan terhadap kewenangan yang seharusnya independen.
Eelemen Retoris	- "Putusan ini juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya tentakel Dinasti Presiden Jokowi." - "Ketentuan... mengada-ada."	2	Pernyataan retorik pertama menyiratkan bahwa keputusan ini secara khusus dirancang untuk memfasilitasi ambisi politik keluarga Jokowi, menggunakan bahasa yang bersifat hiperbolis. Kalimat kedua mengkritik dasar hukum yang dianggap tidak logis atau lemah secara argumentatif.
Metafora	Karpet merah, Tentakel dinasti	2	"Karpet merah" digunakan untuk menggambarkan kemudahan luar biasa yang diberikan kepada keluarga Jokowi melalui perubahan aturan ini. "Tentakel Dinasti" menyiratkan pengaruh keluarga Jokowi yang meluas dan menjangkau berbagai aspek politik, mencerminkan potensi bahaya terhadap demokrasi.

Berita 5

Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Dinasti politik, Persepsi publik, Penjajakan, Wacana	4	Dinasti politik" menciptakan kesan negatif tentang kekuasaan yang dimaksudkan pada keluarga. "Persepsi publik" digunakan untuk menyiratkan bahwa tuduhan tersebut bersifat subyektif dan belum terbukti. Kata "penjajakan" dan "wacana" menunjukkan kecerahan keputusan.
Kosakata	Kandidat terkuat, Internal, Bursa	3	"Kandidat terkuat" menampilkan dukungan awal yang signifikan untuk Erina.

			Internal" dan "bursa" menunjukkan tahapan prosedural dalam proses pencalonan yang melibatkan evaluasi internal sebelum keputusan akhir dibuat.
Elemen Retoris	-“Itu persepsi publik” -“Semua itu kan ada wacana-wacana”	2	"Itu persepsi publik" menyatakan bahwa tuduhan dinasti politik lebih bersifat asumsi subyektif tanpa bukti konkret. “Semua itu kan ada wacana-wacana” menegaskan isu urgensi dengan menyiratkan bahwa itu hanya diskusi awal dan belum memiliki dasar yang kuat.
Metafora	Masuk bursa	1	"Masuk dalam bursa" menggambarkan proses pencalonan sebagai pasar ide atau kompetisi, di mana nama-nama calon dipertimbangkan dan diuji kelayakannya.

Berita 6

Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Dinasti politik, melanggengkan kekuasaan, berevolusi meluaskan trah, masuk MURI atau <i>World Guinness Records</i>	4	“Dinasti politik” memberi konotasi negatif tentang kekuasaan yang diwariskan. “Melanggengkan kekuasaan” menyiratkan ambisi terus memegang pengaruh. Istilah "MURI" atau " <i>World Guinness Records</i> " digunakan sebagai sindiran hiperbolis atas perluasan pengaruh politik keluarga Jokowi
Kosakata	Beradaptasi, kaderisasi, prinsip-prinsip demokrasi	3	“Beradaptasi” digunakan untuk menjelaskan strategi partai dalam menerima tokoh populer meski melanggar idealisme. “Kaderisasi” mengkritik partai politik yang kurang memprioritaskan regenerasi internal.

			“Prinsip demokrasi” menunjukkan pelanggaran nilai-nilai fundamental demokrasi
Elemen Retoris	-“mungkin masuk MURI atau <i>World Guinness Records</i> ya” -“Faktanya, parpol-parpol ini akarnya kurang kuat di masyarakat”	2	Elemen retorik yang menonjol melalui penggunaan ironi, seperti sindiran bahwa Jokowi layak masuk rekor dunia atas pencapaian dinastinya. Hal ini efektif untuk menarik perhatian pembaca dan mengkritik fenomena secara tajam.
Metafora	melanggengkan kekuasaan, dan berevolusi meluaskan trah politik”	2	Metafora seperti "melanggengkan kekuasaan" dan "berevolusi meluaskan trah" menyajikan representasi figuratif tentang upaya yang sistematis dalam memperkuat dinasti politik.

Berita 7

Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	Isu dinasti, takut bertarung, survei elektabilitas, suara rakyat.	4	"Isu dinasti" digunakan untuk membantah kritik bahwa dukungan kepada Bobby hanya karena faktor keluarga Jokowi. "Takut bertarung" adalah diksi emosional yang menyerang balik pihak yang mengancam. "Survei elektabilitas" dan "suara rakyat" menampilkan argumen berbasis popularitas
Kosakata	Popularitas, elektabilitas, demokrasi langsung	3	Popularitas” dan “elektabilitas” mencerminkan pendekatan pragmatis dalam pemilihan kandidat kepala daerah. “Demokrasi langsung” menekankan pentingnya peran pemilih dalam sistem politik untuk memungkinkan mekanisme dukungan terhadap Bobby.

Eelemen Retoris	-“Isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung” -“Dalam demokrasi langsung, suara rakyatlah yang menentukan”	2	"Takut bertarung" adalah klaim emosional untuk menambah legitimasi kritik atas dinasti politik. "Suara rakyatlah yang menentukan" adalah argumen retorik yang berusaha membingkai proses dukungan kepada Bobby sebagai keputusan yang demokratis.
Metafora	"Isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung”	1	Metafora "takut bertarung" menggambarkan pihak yang mengancam dinasti politik sebagai pihak yang tidak siap menghadapi persaingan politik secara sehat.
Berita 8			
Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	dukungan politik dinasti, berjuang untuk memperbaiki umat dan bangsa, cita-cita menegakkan keadilan	3	“dukungan politik dinasti”, diksi ini menunjukkan sikap kritis terhadap praktik politik yang dianggap tidak sehat. "berjuang untuk memperbaiki umat dan bangsa", menunjukkan komitmen PKS terhadap perbaikan sosial dan kemanusiaan. "cita-cita menegakkan keadilan”, menggambarkan nilai-nilai idealisme yang diusung oleh PKS.
Kosakata	koalisi, ketokohan, kesejahteraan, rekam jejak, harmonisasi	5	Kosakata yang digunakan, seperti "koalisi" dan "kesejahteraan," menekankan kompleksitas isu politik dan pentingnya kerjasama antar partai
Eelemen Retoris	- Penggunaan pertanyaan retorik ("Ada juga nada-nada yang agak menggelitik?") - Pernyataan langsung kepada audiens	3	Elemen retorik, seperti pertanyaan retorik dan pernyataan langsung kepada audiens, menggugah perhatian pembaca dan menciptakan koneksi emosional, sekaligus menegaskan keyakinan PKS

	("Insyaallah PKS tidak berubah.") - Pengulangan gagasan tentang "kesejahteraan" dan "keadilan"		dalam misinya.
Metafora	- "berlayar bersama" - "makmurkan Sumut" - "gubernur yang bermarga"	3	Metafora yang diterapkan "berlayar bersama", dan "memakmurkan Sumut" memberikan gambaran bahwa adanya kerjasama politik yang dianggap sebagai upaya memakmurkan Sumut, yang mengacu pada identitas budaya lokal yakni dalam hal ini maksud yang di tuju adalah Bobby Nasution
Berita 9			
Aspek	Data	Jumlah Data	Temuan
Diksi	dinasti politik, keadaan darurat, kewajaran.	3	Diksi dalam teks ini mencerminkan sikap kritis terhadap fenomena dinasti politik. Penggunaan istilah seperti "dinasti politik" menunjukkan penilaian negatif terhadap konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga, sedangkan frasa "keadaan darurat" menandakan urgensi situasi ini yang dianggap mengancam demokrasi. Selain itu, kata "kewajaran" menunjukkan perlunya ada batasan dalam praktik politik untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Diksi ini membantu membangun narasi yang menekankan masalah serius yang dihadapi dalam konteks politik saat ini.
Kosakata	Meritokrasi, prestasi, regulasi, batas, nafsu	5	Kosakata yang digunakan dalam teks ini, seperti "meritokrasi," "prestasi," dan

	politik.		"regulasi," mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ideal. Istilah "meritokrasi" menekankan pentingnya kemampuan dan prestasi individu dalam politik, bukan hanya hubungan kekeluargaan. Selain itu, penggunaan kata "batas" menunjukkan bahwa ada perlunya regulasi dalam praktik politik untuk mencegah dominasi oleh satu keluarga. Frasa "nafsu politik" menyiratkan motivasi yang tidak etis dalam tindakan politik, menyoroti kekhawatiran atas ambisi yang berlebihan. Melalui kosakata ini, penulis menyampaikan kritik terhadap sistem politik yang ada.
Elemen Retoris	- Pernyataan langsung oleh pengamat politik (Ujang Komarudin) - Penggunaan kontras (dinasti di luar negeri vs. di Indonesia) - Pengulangan gagasan tentang "darurat dinasti politik"	3	Elemen retorika dalam teks ini, seperti pernyataan langsung dari pengamat politik Ujang Komarudin, memberikan kredibilitas dan otoritas pada argumen yang disampaikan. Selain itu, penggunaan kontras antara dinasti politik di luar negeri dan di Indonesia menyoroti perbedaan praktik yang signifikan dan memperkuat kritik terhadap situasi lokal. Pengulangan gagasan tentang "darurat dinasti politik" berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan menekankan pentingnya isu ini. Elemen-elemen ini digunakan untuk membangun argumen yang kuat dan meyakinkan pembaca tentang urgensi masalah yang dihadapi.
Metafora	- "darurat dinasti"	2	Penggunaan metafora,

	politik” - "dikuasai orang-orang tertentu”		seperti "darurat dinasti politik," memberikan kedalaman pada pernyataan yang disampaikan. Istilah "darurat" menciptakan gambaran situasi yang mendesak dan kritis, menunjukkan bahwa fenomena ini tidak bisa diabaikan. Selain itu, frasa "dikuasai orang-orang tertentu" menyiratkan kekhawatiran akan konsentrasi kekuasaan dalam kelompok tertentu yang dapat mengancam keberagaman dan keadilan dalam pemerintahan. Metafora ini memperkaya narasi dengan menggambarkan implikasi sosial-politik dari dinasti politik yang meluas.
Berita 10			
Diksi	Politik dinasti, mendorong, tersinyalir.	3	Diksi dalam teks ini menggambarkan kritik terhadap fenomena politik dinasti yang semakin meluas. Istilah "politik dinasti" secara jelas menunjukkan konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dalam satu keluarga. Kata "mendorong" menunjukkan upaya aktif Jokowi dalam mengarahkan karier politik keluarganya, sementara "tersinyalir" mengindikasikan adanya rumor atau indikasi yang menciptakan kesan bahwa langkah-langkah politik ini sudah direncanakan.
Kosakata	Walikota, bupati, gubernur, rekam jejak, hebat	5	Kosakata yang digunakan, seperti "Wali Kota", "Bupati", dan "Gubernur", menekankan ambisi politik dari anggota keluarga

			Jokowi, yang ingin mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Istilah "rekam jejak" menunjukkan pentingnya latar belakang dan pengalaman dalam menilai kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik, sementara kata "hebat" mencerminkan harapan positif terhadap kemampuan calon yang diusung.
Elemen Retoris	- Pernyataan langsung oleh Ikrar Nusa Bhakti, “tapi apa yang terjadi dengan presiden kita ya, ini enggak cukup dengan Gibran, ini akan lanjut dengan kaesang” - Penggunaan contoh konkret (Kaesang dan Erina)	2	Elemen retorika dalam teks ini, seperti pernyataan langsung dari Ikrar Nusa Bhakti, memberikan kredibilitas dan otoritas pada argumen yang disampaikan. Penggunaan contoh konkret, seperti Kaesang dan Erina, memperkuat argumen dengan menunjukkan individu spesifik yang terlibat dalam politik dinasti. Selain itu, pertanyaan retorika menggugah pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang implikasi dari praktik politik ini, menambah daya tarik narasi.
Metafora	Dinasti, pengadilan rakyat menanti	2	Penggunaan metafora "dinasti" menciptakan citra yang kuat mengenai konsentrasi kekuasaan yang diwariskan dalam konteks politik, menekankan bahwa kekuasaan tidak seharusnya hanya berputar di antara anggota keluarga tertentu. Frasa "pengadilan rakyat menanti" menggambarkan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi akibat praktik politik yang tidak adil, menunjukkan bahwa masyarakat akan mengawasi dan mengkritisi tindakan

			politik yang dianggap tidak sehat.
--	--	--	------------------------------------

4.1.2 Dimensi Praktik Wacana (Mesostruktural) dalam Berita Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Tabel 4.3 Data Level Mesostruktural

Hal yang Diamati	Media	Temuan
Produksi Teks	<i>Kompas.com</i>	1. Memuat sebanyak 5 berita secara konsisten mulai dari Maret, Juni, hingga Juli 2. Fokus pada isu dinasti politik Jokowi dengan data dan pandangan dari akademisi, pengamat politik maupun aktivis. 3. Opini yang ditampilkan menerapkan kutipan langsung oleh tokoh-tokoh yang dianggap relevan seperti Ray Rangkuti, Feri Amsari, dan Zaki Mubarak.
	<i>TribunNews.com</i>	1. Memuat 2 berita yakni pada bulan Maret saja. 2. Menyoroti persepsi public dan komentar pada politisi terkait isu dinasti politik. 3. Penyajian berita lebih berupa wawancara langsung dan komentar yang singkat dari tokoh partai. 4. Narasi yang ditampilkan lebih ringan namun informatif.
	<i>Detik.com</i>	1. Memuat 1 berita pada bulan Agustus 2. Teks ditampilkan dengan perspektif yang netral dengan menyampaikan alasan dukungan parpol seperti PKS terhadap Bobby Nasution. 3. Memadukan informasi terkait strategi politik lokal dan pernyataan politisi partai secara langsung.
	<i>Medcom.id</i>	1. Memuat 2 berita pada bulan

		Maret dan Agustus. - Menekankan pandangan kritis terhadap perkembangan dinasti politik dengan mengutip komentar dari para akademisi dan pengamat politik. - Menyertakan detail kebijakan dan regulasi terkait untuk mendukung argumen.
Konsumsi Teks	Kompas.com	Seluruh berita dari 4 media tersebut diterbitkan melalui media online pada masing-masing portal berita, teks sebagian besar oleh khalayak luas, terkhusus para masyarakat yang nantinya ikut dalam pemilihan kepala daerah 2024. Dimana media - media ini memberikan gambaran kepada masyarakat dalam mempertimbangkan siapa calon kepala daerah yang akan dipilih kedepannya.
	TribunNews.com	
	Detik.com	
	Medcom.id	

4.1.3 Dimensi Sosial Budaya (Makrostruktural) dalam Berita Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Tabel 4.4 Data Level Makrostruktural

Level	Temuan
Tingkat Situasional	Dilihat per periode berita di publikasikan: 1. Maret 2024 Publik dibuat panas terkait terdengarnya wacana pencalonan anak dan menantu Presiden Jokowi (Kesang dan Erina Gudono), dan juga Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. Wacana ini memicu kritik terhadap potensi politik dinasti. 2. Juni 2024 Munculnya usulan PAN mengenai pasangan calon Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta. Diskusi mulai beralih dari kritik terhadap politik dinasti menjadi strategi partai politik dalam Pilkada 3. Juli 2024 Mulai meningkatnya dukungan partai politik terhadap Bobby Nasution di Pilkada Sumut. Pada rentan waktu ini Bobby dikait-kaitkan dengan menantu presiden, yang dikhawatirkan kembali

	pada politik dinasti. 4. Agustus 2024 Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait batasan usia calon kepala daerah memicu potensi adanya peluang bagi dinasti politik Jokowi.
Tingkat Institusional	1. Insitusi Pemerintah: Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 2. Partai Politik PSI, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem, PDI-P 3. LSM dan Pengamat Lingkar Madani, Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Investor dari UIN Jakarta dan UGM.
Tingkat Sosial	- Kondisi sosial pada saat berita dibuat yakni meningkatnya perhatian publik terhadap isu politik dinasti yang dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Kritik tersebut semakin tajam, terutama saat setelah Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres dan munculnya nama Kaesang serta Erina dalam bursa Pilkada. - Selain itu, situasi sosial di masyarakat semakin terfragmentasi, dengan adanya polarisasi politik yang terlihat dari perbedaan pandangan masyarakat terhadap legitimasi politik dinasti. - Pada saat yang sama, terjadi tekanan terhadap lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena dianggap membuat keputusan yang mendukung politik dinasti.

4.2 Pembahasan

Analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough adalah salah satu pendekatan yang paling relevan untuk menginvestigasi wacana terkait isu politik dinasti yang berkembang saat ini. Fairclough memandang bahasa sebagai praktik kekuasaan yang tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga bahasa di pandang sebagai alat kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, Fairclough mengembangkan model analisisnya ke dalam 3 dimesi yakni dimensi mikrostruktural, dimensi mesostruktural, dan dimensi makrostruktural. Ketiga

dimensi tersebut akan diterapkan dalam analisis berita wacana isu politik dinasti menjelang Pilkada 2024.

4.2.1 Analisis Mikrostruktural dalam Berita Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Sesuai dengan judul penelitian ini, pada bagian pembahasan ini akan dilakukan analisis wacana kritis terhadap berita *online* yang membahas isu politik dinasti menjelang Pilkada serentak 2024. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkapkan realitas di balik teks dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi produksi berita tersebut. Sebuah teks tidak terlepas dari kepentingan subjektif yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan teori Norman Fairclough, analisis wacana teks di bagi menjadi tiga elemen dasar, yaitu representasi, relasi, dan identitas, yang digunakan untuk mengurai dan menganalisis bagaimana isu politik dinasti direpresentasikan dalam media.

Berita 1

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Dalam teks berita pertama yang berjudul *Wacana Anak Menantu - Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat 'Politik Dinasti'*, menampilkan wacana politik dinasti di Indonesia sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.

Data yang diperoleh menunjukkan representasi yang terfokus pada narasi negatif melalui penggunaan diksi seperti "darurat," "merajalela," dan "tidak wajar." Pemilihan kata ini membangun kesan urgensi dan bahaya. Elemen retorik, seperti "kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik," memperkuat argumentasi tersebut dengan gaya hiperbola, menekankan kesan ancaman sistemik.

Metafora "merajalela" menyiratkan politik dinasti sebagai kekuatan yang tidak terkendali, menciptakan narasi yang mendukung pandangan bahwa praktik ini bertentangan dengan asas keadilan dan meritokrasi. Penggunaan istilah seperti "kolusi" dan "nepotisme" juga menyiratkan implikasi negatif, dengan menyiratkan bahwa politik dinasti memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa situasi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Winters, 2018).

b) Relasi

Relasi dalam hal ini merujuk kepada analisis, yakni bagaimana konstruksi hubungan diantara partisipan dalam wacana (Endang, 2010). Dalam berita berjudul Wacana Anak Menantu - Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat 'Politik Dinasti, ditemukan beberapa konstruksi hubungan diantara partisipan. Partisipan utama dalam teks berita ini adalah Ray Rangkuti. Ray Rangkuti adalah seorang aktivis dan pengamat politik Indonesia yang dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap berbagai isu politik, termasuk praktik politik dinasti. Ia merupakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), sebuah

organisasi yang fokus pada advokasi demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

“**Kita** sudah berada dalam kondisi darurat politik dinasti”, kata Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Ray Rangkuti”

Melalui kutipan tersebut, terlihat bahwasannya adanya relasi antar khalayak media. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ray Rangkuti menciptakan hubungan formal dan mengajak pembaca untuk serius menanggapi isu ini. Kata “kita” mewakili suara partisipan dan pembaca dalam kalimat tersebut. Disisi lain, posisi wartawan dalam teks berita ini adalah sebagai perantara yang menyajikan berbagai pandangan berbagai pihak, termasuk pemerhati politik dan partai politik, untuk memberikan gambaran yang lebih luastentang situasi. Dapat dilihat bahwa wartawan selaku media tidak berpihak ke pihak manapun, karena menyertakan argumen berbagai pihak dalam beritanya.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam teks berita pertama yang berjudul Wacana Anak Menantu - Jokowi Maju Pilkada, Indonesia Dianggap Darurat ‘Politik Dinasti’ ini, jurnalis mengidentifikasi aktor / partisipan yang terlibat dalam wacana pemberitaan tersebut. Dalam hal ini, berita tersebut lebih menonjolkan Ray Rangkuti, yang memposisikan dirinya sebagai seorang kritikus dan pemberi peringatan mengenai semakin dominannya politik dinasti di Indonesia. Sementara itu, anggota keluarga Presiden Jokowi, termasuk Erina Gudono dan Kaesang Pangarep, digambarkan sebagai pihak calon peserta dalam Pilkada 2024, yang didukung oleh partai – partai politik, yang memperkuat narasi

politik dinasti. Jurnalis juga menyoroti Ray Rangkuti sebagai kritikus utama, menonjolkan otoritasnya melalui kutipan langsung dan memosisikan dirinya sebagai sumber yang kredibel. Hal ini terlihat pada kutipan berikut:

Berita 2

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Ini melibatkan analisis bentuk teks formal seperti pemahaman, semantik, dan tata kalimat untuk menemukan nilai-nilai ideologis yang terkandung dalam teks. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Diksi dalam berita ini menunjukkan narasi yang sangat kritis terhadap usulan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta. Kata-kata seperti "kurang tepat," "pragmatis," dan "gimmick" digunakan untuk menyoroti kelemahan langkah tersebut. Misalnya, istilah "kurang tepat" menciptakan kesan bahwa usulan tersebut tidak memiliki landasan yang kuat, sementara "gimmick" memberikan makna bahwa ini hanya strategi politik kosong tanpa substansi nyata. Diksi ini mendukung pembentukan citra PAN sebagai partai yang pragmatis dan kehilangan daya moral sebagai kekuatan reformis, sesuai dengan kritik yang disampaikan Zaki Mubarak. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh

Fiorina (2019), penggunaan diksi yang merendahkan sering kali bertujuan untuk menciptakan delegitimasi terhadap lawan politik, yang dalam kasus ini diarahkan kepada PAN. Pendekatan ini menggiring pembaca untuk mempertanyakan kredibilitas partai tersebut dalam mempertahankan prinsip reformasi.

Kosakata seperti "dinasti politik," "anak kandung reformasi," dan "kekuatan reformis" memperkuat narasi kritik terhadap PAN. Penyebutan "dinasti politik" menunjukkan bahwa usulan duet ini dianggap melanggengkan politik dinasti, yang sering dikaitkan dengan praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi meritokratis. Istilah "anak kandung reformasi" menciptakan kontras tajam antara asal mula PAN sebagai partai reformis dengan langkah-langkahnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan idealisme awalnya.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Dalam hal ini, posisi wartawan dalam teks pemberitaan hanya sebagai pemberi informasi atas narasi yang diberikan oleh Zaki, selaku pengamat politik yang suaranya dimuat dalam pemberitaan tersebut. Relasi antara partai politik dan elite politik di sini terkait erat dengan strategi kekuasaan. PAN mendukung Kaesang untuk mengamankan relasi mereka dengan Jokowi, bukan demi kepentingan publik. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan memengaruhi keputusan politik.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam berita ini, identitas PAN sebagai partai reformis yang lahir dari gerakan reformasi kini berubah menjadi

partai pragmatis yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nilai-nilai reformasi yang dulu diperjuangkan. Selain itu juga, identitas Kaesang sebagai calon wakil gubernur bersama Ridwan Kamil dibangun sebagai figur yang memiliki kekuatan politik yang besar, meskipun masih sangat baru dalam dunia politik. Ini mencerminkan bagaimana dinasti politik memberikan pengaruh besar pada identitas politik seseorang.

Berita 3

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Diksi dalam berita ini sangat tajam dan kritis, menggunakan kata-kata seperti "tidak sesuai," "omong kosong," dan "bahaya" untuk membangun narasi yang mengancam politik dinasti dalam keluarga Presiden Joko Widodo. Kata "tidak sesuai" digunakan untuk menunjukkan ketidakcocokan antara praktik politik dinasti dan prinsip dasar konstitusi Indonesia, sementara "omong kosong" secara eksplisit meremehkan klaim prestasi Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, istilah "bahaya" memperkuat persepsi ancaman terhadap demokrasi jika dinasti politik terus berkembang. Penggunaan diksi ini menggarisbawahi kegagalan sistem demokrasi dalam mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga. Diksi kritis semacam ini sering digunakan untuk memperkuat posisi pengamat atau

penulis berita dalam mengkritik aktor politik tertentu (Shoemaker & Reese, 2013). Dengan menggarisbawahi ketidaksesuaian dengan konstitusi, berita ini membingkai dinasti politik sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Elemen retorik yang menonjol dalam berita ini adalah penggunaan pernyataan tegas dan hiperbolis, seperti "konstitusi tidak dirancang untuk keluarga" dan "omong kosong kalau kita bicara prestasi Gibran." Pernyataan ini bertujuan untuk memperkuat pandangan bahwa politik dinasti bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan meritokrasi. Menurut Tannen (2007), elemen retorik seperti ini efektif untuk menggugah emosi pembaca dan menciptakan narasi yang persuasif. Dalam konteks berita ini, retorika semacam ini mendorong pembaca untuk mempertanyakan legitimasi politik dinasti, terutama ketika dikaitkan dengan posisi keluarga Jokowi dalam struktur kekuasaan.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Berdasarkan berita ke-3 ini, wartawan berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan wacana kritik pada khalayak. Melalui pemilihan narasumber Feri Amsari yang menyoroti bahwa "konstitusi tidak dirancang untuk keluarga". Tujuan wartawan disini adalah menggiring opini publik untuk mempertanyakan praktik politik dinasti. Adapun posisi Feri Amsari adalah seorang pakar hukum tata negara. Relasi antara wartawan dan Feri Amsari menunjukkan bahwa wartawan memberikan otoritas kepada partisipan publik yang memiliki kredibilitas dan legitimasi untuk mengkritik kekuasaan.

Wartawan dalam hal ini memilih untuk memihak narasi anti-dinasti yang memperkuat hubungan yang mendukung suara kritis terhadap kekuasaan. Dalam kerangka Fairclough, hubungan ini mencerminkan bias media yang berfungsi untuk menentang struktur dominasi.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Pada berita ini, posisi wartawan terlihat sebagai pihak yang aktif menyampaikan kritik terhadap praktik politik dinasti dengan menggunakan sudut pandang yang mendalam. Dalam hal ini, wartawan memilih untuk menonjolkan kritik melalui penyajian fakta dan pendapat pengamat hukum yakni Feri Amsari. Dengan mengutip Feri Amsari, wartawan menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi. Hal ini sejalan dengan Wyatt, W. N (2014), yang menyatakan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab untuk memperkuat narasi yang mendukung nilai-nilai demokrasi, terutama dalam situasi praktik politik.

Berita 4

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Berita 4 merepresentasikan dinasti politik sebagai ancaman ideologis terhadap demokrasi melalui diksi, metafora, dan framing yang kritis. Pendekatan ini konsisten dengan analisis wacana kritis Fairclough yang menunjukkan bahwa teks dapat membongkar atau memperkuat relasi kekuasaan dalam masyarakat. Penggunaan diksi seperti "karpas merah," "tentakel dinasti," dan "mengada-ada" mencerminkan kritik tajam terhadap keputusan MA, yang dipandang sebagai fasilitator politik dinasti. Diksi ini menegaskan ideologi anti-oligarki dengan menyimbolkan keluarga Jokowi sebagai aktor dominan yang memperluas pengaruhnya secara sistematis. Metafora "tentakel dinasti" menggambarkan penyebaran kekuasaan yang merusak nilai-nilai meritokrasi, mendukung pandangan Winters (2018) bahwa politik dinasti memarginalkan prinsip demokrasi.

Teks ini menciptakan oposisi biner antara pihak kritis (ICW dan PSHK) yang mewakili nilai meritokrasi dan keadilan, dengan keluarga Jokowi yang direpresentasikan sebagai simbol ketimpangan kekuasaan. Fairclough (2003) menekankan bahwa representasi seperti ini membentuk persepsi publik tentang kekuasaan dominan sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang adil.

Keputusan MA direpresentasikan sebagai bentuk legitimasi terhadap konsentrasi kekuasaan yang melanggar norma demokrasi. Representasi ini mencerminkan konteks sosial Indonesia, di mana institusi hukum sering dianggap rentan terhadap tekanan politik.

b) Relasi

Relasi dalam berita 4 mencakup hubungan yang dibangun oleh wartawan antara narasumber, khalayak, dan partisipan publik. Dalam berita ini, wartawan

menghadirkan beberapa pihak utama yang berelasi, yaitu Mahkamah Agung (MA), peneliti dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*), dan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan). Wartawan berperan sebagai penghubung yang menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan MA mengenai perubahan aturan usia calon kepala daerah, yang dianggap memfasilitasi dinasti politik keluarga Presiden Jokowi.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan narasumber dari ICW, yaitu Seira Tamara, yang secara langsung memberikan pernyataan bahwa keputusan MA telah membuka "karpet merah" bagi perluasan dinasti politik Jokowi. Kutipan seperti "putusan ini memberikan karpet merah untuk tentakel dinasti Jokowi" mempertegas kritik yang disampaikan kepada pembaca, menunjukkan keberpihakan narasumber terhadap pandangan bahwa keputusan ini melanggar prinsip keadilan politik.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan MA sebagai partisipan publik. Dalam berita ini, wartawan membingkai MA sebagai institusi yang dianggap mengabaikan deliberasi hukum yang matang dan justru memprioritaskan kepentingan politik keluarga Jokowi. Keputusan MA untuk mengubah aturan usia calon kepala daerah disebut sebagai langkah yang "janggal" dan "mengada-ada," menempatkan MA dalam posisi defensif.

Relasi ketiga adalah antara wartawan dan khalayak. Wartawan menghadirkan narasi yang menggiring pembaca untuk memahami keputusan MA sebagai ancaman terhadap demokrasi. Melalui framing kritis, wartawan menghubungkan pembaca dengan pandangan bahwa institusi hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dinasti.

Kutipan langsung dari Seira Tamara, seperti "putusan ini juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya tentakel dinasti Presiden Jokowi," memperkuat narasi bahwa keputusan ini tidak hanya janggal, tetapi juga berisiko mencederai prinsip demokrasi. Dengan demikian, relasi dalam berita ini memperlihatkan peran wartawan sebagai fasilitator wacana kritis terhadap dominasi kekuasaan dinasti politik.

c) Identitas

Identitas dalam analisis wacana kritis merujuk pada bagaimana aktor atau kelompok tertentu dikonstruksikan dalam teks, baik itu individu atau institusi. Dalam berita 4, identitas yang ditonjolkan mencakup Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi pengambil keputusan, keluarga Presiden Jokowi sebagai simbol dinasti politik, dan ICW serta PSHK sebagai aktor kritis.

1. Mahkamah Agung (MA) direpresentasikan sebagai institusi yang diduga melonggarkan aturan demi kepentingan politik keluarga Presiden. Identitasnya sebagai institusi hukum independen dipertanyakan melalui narasi bahwa keputusan yang diambil bersifat "janggal" dan "mengada-ada," menciptakan kesan MA tunduk pada tekanan politik.
2. Keluarga Presiden Jokowi direpresentasikan sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari keputusan MA. Identitas keluarga ini dilabeli sebagai pusat dinasti politik dengan istilah seperti "tentakel dinasti," menggambarkan pengaruh luas dan strategisnya dalam politik.
3. ICW dan PSHK tampil sebagai suara kritis, dengan identitas mereka sebagai lembaga independen yang memperjuangkan keadilan dan

transparansi hukum. Kutipan langsung dari peneliti ICW memperkuat peran mereka sebagai pengawas demokrasi.

Wartawan dalam berita ini mengambil posisi kritis, berperan sebagai mediator yang menyampaikan kritik dari ICW dan PSHK kepada khalayak, sekaligus mempertanyakan legitimasi keputusan MA. Identitas wartawan sebagai pengawas kekuasaan tercermin dalam framing berita yang mempertegas ancaman dinasti politik terhadap demokrasi.

Berita 5

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Berita 5 merepresentasikan politik dinasti melalui framing yang menyeimbangkan kritik dengan narasi netral. Representasi ini mencerminkan bagaimana media memanfaatkan framing ideologis untuk menampilkan dunia sosial sebagai ruang diskusi sambil menjaga hubungan dengan aktor dominan dalam konteks politik. Penggunaan diksi seperti "persepsi publik" mengesankan bahwa tuduhan dinasti politik lebih merupakan pandangan subjektif daripada fakta. Namun, diksi seperti "penjajakan" dan "wacana" tetap menempatkan praktik politik dinasti dalam kerangka eksperimen politik yang belum final. Representasi ini mendukung argumen Norris (2017), yang menunjukkan bahwa

framing media dapat digunakan untuk mengontrol intensitas kritik terhadap aktor dominan sambil tetap menyampaikan pesan kepada khalayak.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Relasi dalam Berita 5 melibatkan wartawan, partisipan publik, dan khalayak media, dengan fokus pada isu dinasti politik terkait pencalonan Erina Gudono. Wartawan berperan sebagai penghubung yang menyampaikan wacana tentang persepsi publik terhadap dinasti politik serta strategi politik partai pendukung.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan partisipan publik, seperti Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dan Ketua DPC Gerindra Sleman HR Sukaptana. Herman Khaeron menyebut bahwa isu dinasti politik hanya "persepsi publik," menunjukkan upaya defensif partai dalam merespons kritik. Sementara itu, Sukaptana memposisikan Erina sebagai salah satu kandidat potensial, yang masuk dalam "penjajakan" internal partai. Kutipan langsung ini menggambarkan partisipan publik sebagai aktor yang membingkai pencalonan Erina dalam kerangka normatif.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan khalayak. Wartawan menyampaikan narasi yang membingkai isu dinasti politik sebagai wacana yang belum final, memberikan kesan netral tetapi tetap menyisipkan kritik implisit terhadap potensi dominasi kekuasaan oleh keluarga Jokowi. Melalui relasi ini, wartawan menghubungkan khalayak dengan pandangan bahwa pencalonan Erina masih dalam tahap evaluasi, meskipun implikasi politik dinasti tetap menjadi

perhatian utama. Relasi ini memperlihatkan wartawan sebagai fasilitator diskusi publik tentang dinamika kekuasaan dan regenerasi politik.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Identitas dalam berita ini menggambarkan partisipasi tokoh dan institusi dalam wacana dinasti politik yang memengaruhi persepsi khalayak terhadap keadilan dan regenerasi politik. Partai Politik (Demokrat dan Gerindra) memiliki identitas defensif. Demokrat berusaha meredam kritik dengan menyebut isu dinasti sebagai "persepsi publik," sementara Gerindra memposisikan diri sebagai pihak yang masih mengevaluasi kandidat.

Berita 6

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Berita 6 merepresentasikan dinasti politik sebagai ancaman terhadap meritokrasi dan demokrasi melalui diksi kritis, metafora hiperbolis, dan framing yang menciptakan oposisi ideologis. Pendekatan ini mendukung analisis Fairclough bahwa teks adalah arena di mana kekuasaan dan ideologi saling bertarung. Dengan memanfaatkan bahasa yang tajam, media membangun dunia sosial yang memperlihatkan ancaman konsentrasi kekuasaan terhadap nilai-nilai

demokrasi. Diksi seperti “melanggengkan kekuasaan” dan “berevolusi meluaskan trah” menunjukkan kritik eksplisit terhadap dinasti politik, mencerminkan ideologi anti-oligarki. Kosakata seperti “kaderisasi” dan “prinsip-prinsip demokrasi” memperlihatkan tuntutan terhadap sistem politik yang berbasis meritokrasi. Representasi ini konsisten dengan temuan Hanitzsch dan Vos (2018), yang menyoroti bahwa media sering memanfaatkan diksi kritis untuk mengungkap ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat.

Media membingkai dunia sosial sebagai ruang yang terancam oleh konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga. Metafora seperti “masuk MURI atau World Guinness Records” memberikan gambaran hiperbolis bahwa dinasti politik Jokowi telah melampaui batas kewajaran. Pendekatan ini mencerminkan fungsi media sebagai pembentuk opini publik dalam menantang dominasi kekuasaan (Entman & Usher, 2020). Dengan mengangkat narasi ini, media berusaha mengartikulasikan ancaman dinasti politik terhadap prinsip demokrasi yang ideal.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Relasi dalam berita 6 melibatkan wartawan, partisipan publik, dan khalayak media, dengan fokus pada kritik terhadap dinasti politik Presiden Jokowi. Wartawan menghubungkan pembaca dengan wacana kritis melalui narasumber seperti Nyarwi Ahmad, pengamat politik UGM, dan penokohan keluarga Presiden sebagai pusat dominasi politik.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan partisipan publik, yaitu Nyarwi Ahmad. Melalui pernyataannya seperti "Jokowi sukses membangun

dinasti politik pascareformasi," wartawan memosisikan narasumber sebagai pengamat yang memberikan otoritas pada kritik terhadap dinasti politik. Narasi ini menyoroti ekspansi kekuasaan keluarga Jokowi sebagai ancaman terhadap regenerasi politik yang sehat.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan khalayak. Wartawan membingkai keluarga Jokowi sebagai simbol dominasi politik melalui penggunaan metafora "berevolusi meluaskan trah." Framing ini mengarahkan pembaca untuk memahami dampak sistemik dari dinasti politik terhadap demokrasi.

Relasi ini menunjukkan bagaimana wartawan berperan sebagai fasilitator kritik yang menghubungkan narasumber dan khalayak dengan narasi tentang bahaya dinasti politik. Pendekatan ini memperlihatkan media sebagai alat diskursif untuk menantang konsentrasi kekuasaan dalam politik Indonesia.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam Berita 6, identitas yang ditonjolkan meliputi keluarga Presiden Jokowi, partai politik, dan pengamat politik. Keluarga Jokowi direpresentasikan sebagai aktor dominan dalam politik Indonesia, dengan label seperti "dinasti politik" dan metafora "berevolusi meluaskan trah," yang menekankan dominasi kekuasaan mereka. Partai politik digambarkan sebagai pihak yang beradaptasi secara pragmatis untuk mendukung kepentingan dinasti ini, meskipun sering mengabaikan prinsip demokrasi. Sementara itu, pengamat politik seperti Nyarwi Ahmad diberikan identitas sebagai suara kritis yang mengungkap ancaman dinasti politik terhadap regenerasi politik

dan nilai-nilai demokrasi. Wartawan, dalam teks ini, berperan sebagai mediator yang memperkuat kritik melalui kutipan dan framing narasi, menonjolkan isu konsentrasi kekuasaan sebagai masalah utama dalam sistem politik Indonesia.

Berita 7

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Berita 7 merepresentasikan dunia sosial sebagai kontestasi legitimasi, tetapi framing cenderung mendukung dinasti politik dengan menekankan popularitas dan demokrasi langsung sambil mendiskreditkan kritik. Pendekatan ini mendukung analisis Fairclough bahwa representasi ideologi dalam teks sering digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan.

Diksi seperti “takut bertarung” dan “isu dinasti” digunakan untuk mendiskreditkan kritik terhadap Bobby Nasution, dengan menyiratkan bahwa pengkritik tidak memiliki keberanian atau kemampuan bersaing secara politik. Di sisi lain, kosakata seperti “elektabilitas” dan “suara rakyat” menegaskan legitimasi demokrasi langsung sebagai dasar dukungan terhadap Bobby. Pendekatan ini mencerminkan ideologi yang mengedepankan pragmatisme politik dan kekuatan elektoral dibandingkan meritokrasi. Hanitzsch dan Vos (2018) menunjukkan bahwa media sering kali membingkai isu politik dengan diksi yang memihak

untuk memperkuat narasi legitimasi kekuasaan, terutama ketika melibatkan aktor politik dominan.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Relasi dalam Berita 7 melibatkan wartawan, partisipan publik, dan khalayak media dengan fokus pada pembingkaihan isu dinasti politik terkait pencalonan Bobby Nasution. Wartawan menghubungkan pembaca dengan pandangan pro-dinasti dan anti-dinasti melalui kutipan dari tokoh politik dan strategi framing yang menonjolkan demokrasi langsung sebagai legitimasi.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan partisipan publik, seperti Grace Natalie (PSI) dan Djarot Saiful Hidayat (PDI-P). Grace Natalie memposisikan kritik terhadap dinasti politik sebagai bentuk ketidakmampuan kompetitor melalui frasa "isu dinasti hanya dilontarkan mereka yang takut bertarung." Sebaliknya, Djarot menyoroti pertanyaan tentang legitimasi dukungan terhadap Bobby, yang diduga berasal dari pengaruh mertuanya, Presiden Jokowi. Kutipan ini memperlihatkan dualitas opini dalam pemberitaan.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan khalayak. Wartawan menyampaikan narasi yang menyeimbangkan pandangan pendukung dan pengkritik, dengan menggunakan frasa seperti "suara rakyatlah yang menentukan." Framing ini mengarahkan pembaca untuk memahami pencalonan Bobby sebagai bagian dari sistem demokrasi langsung. Relasi ini menunjukkan peran wartawan sebagai fasilitator diskusi publik, memberikan ruang bagi narasi pro-dinasti dan kritik terhadap dominasi keluarga politik. Dengan demikian,

wartawan menciptakan arena bagi khalayak untuk menilai isu dinasti politik secara kritis.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam Berita 7, identitas yang ditonjolkan meliputi Bobby Nasution sebagai representasi dinasti politik, partai-partai pendukungnya, dan pengkritik dinasti politik. Bobby direpresentasikan sebagai figur yang mendapatkan legitimasi dari elektabilitas dan dukungan demokrasi langsung, meskipun tetap dikaitkan dengan pengaruh keluarga Presiden Jokowi. Partai-partai pendukung, seperti PSI, digambarkan sebagai aktor yang memanfaatkan strategi populisme untuk menjustifikasi dukungan terhadap Bobby. Di sisi lain, pengkritik dinasti politik, seperti Djarot Saiful Hidayat, diberikan identitas sebagai pihak yang mempertanyakan integritas proses politik yang didominasi oleh pengaruh keluarga. Wartawan memainkan peran sebagai mediator, menyeimbangkan identitas pro-dinasti dan kritik dengan memberikan ruang bagi narasi demokrasi langsung dan pertanyaan kritis terkait legitimasi kekuasaan.

Berita 8

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan

memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida, 2014).

Berita 8 merepresentasikan dunia sosial sebagai arena kompromi antara idealisme politik PKS dan realitas pragmatisme dinasti politik. Dengan diksi dan framing yang menonjolkan kerja sama strategis, teks ini membingkai dukungan PKS terhadap Bobby Nasution sebagai langkah rasional yang tetap selaras dengan ideologi keadilan sosial. Pendekatan ini mendukung analisis Fairclough bahwa representasi dalam teks mencerminkan upaya untuk mengelola ketegangan antara ideologi dan praktik politik.

Diksi seperti “berjuang untuk memperbaiki umat dan bangsa” dan “cita-cita menegakkan keadilan” menunjukkan klaim moral PKS dalam mendukung Bobby Nasution. Ini merepresentasikan ideologi keadilan sosial yang menjadi dasar pembelaan PKS. Di sisi lain, penggunaan kosakata seperti “koalisi” dan “ketokohan” mencerminkan pragmatisme politik untuk mencapai tujuan strategis. Pendekatan ini konsisten dengan pandangan Hanitzsch dan Vos (2018), yang menekankan bahwa media sering membingkai narasi yang menggabungkan idealisme dengan pragmatisme untuk menyeimbangkan kritik dan pembelaan. Teks ini menggambarkan dunia sosial di mana praktik politik dinasti tidak dilihat secara mutlak negatif, melainkan sebagai bagian dari kompromi politik untuk mencapai tujuan kolektif. Metafora seperti “berlayar bersama” menciptakan gambaran bahwa dukungan terhadap Bobby merupakan kerja sama yang rasional dan strategis, bukan sekadar penyokong dinasti politik. Representasi ini menunjukkan bahwa media berperan dalam mengurangi intensitas kritik terhadap

PKS dengan menampilkan narasi kolaboratif. Representasi ini mendukung temuan Entman dan Usher (2020), yang menyatakan bahwa framing defensif sering digunakan untuk meredam potensi kritik terhadap institusi atau aktor dominan.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam teks. Relasi dalam berita 8 melibatkan wartawan, partisipan publik, dan khalayak media, dengan fokus pada dukungan PKS terhadap pencalonan Bobby Nasution dalam Pilkada Sumut. Wartawan bertindak sebagai penghubung antara narasumber, seperti Tifatul Sembiring dari PKS, dan khalayak, untuk menyampaikan narasi yang menyeimbangkan antara pembelaan terhadap PKS dan kritik terhadap politik dinasti.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan partisipan publik, di mana Tifatul Sembiring, sebagai perwakilan PKS, memberikan pernyataan seperti "Insyaallah PKS tidak berubah, kami berjuang untuk memperbaiki umat dan bangsa." Pernyataan ini membingkai PKS sebagai partai yang mempertahankan idealisme, meskipun mendukung figur yang terkait dengan dinasti politik. Kutipan ini memperkuat citra PKS sebagai aktor yang memperjuangkan keadilan sosial.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan khalayak, di mana wartawan menyampaikan narasi yang menciptakan ruang diskusi mengenai keabsahan dukungan PKS terhadap Bobby. Wartawan juga memanfaatkan metafora seperti "berlayar bersama" untuk menggambarkan kolaborasi politik sebagai langkah strategis.

Relasi ini menunjukkan bagaimana wartawan menyeimbangkan pembelaan dan kritik terhadap dukungan PKS, memberikan ruang bagi khalayak

untuk menilai posisi PKS dalam dinamika politik yang melibatkan dinasti politik. Pendekatan ini memperlihatkan peran media sebagai fasilitator wacana politik yang kompleks.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam Berita 8, identitas yang ditonjolkan meliputi PKS sebagai partai politik, Bobby Nasution sebagai figur politik terkait dinasti, dan wartawan sebagai penghubung wacana. PKS direpresentasikan sebagai partai yang mempertahankan idealisme, dengan klaim memperjuangkan keadilan sosial meskipun mendukung kandidat dari dinasti politik. Identitas Bobby Nasution ditampilkan sebagai tokoh dengan potensi elektoral tinggi, tetapi tetap dibayangi oleh hubungan keluarganya dengan Presiden Jokowi. Wartawan berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan narasi PKS kepada khalayak, sekaligus memberikan ruang untuk diskusi kritis terkait keputusan partai tersebut dalam mendukung kandidat yang diasosiasikan dengan dinasti politik. Identitas dalam berita ini menunjukkan kompleksitas antara idealisme dan pragmatisme dalam strategi politik.

Berita 9

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Representasi ini penting karena akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ideologi yang direpresentasikan dalam teks, seperti bagaimana suatu teks merepresentasikan dunia sosial (Munfrida,

2014). Berita 9 merepresentasikan dinasti politik sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dengan diksi yang mendramatisasi situasi, metafora yang memperkuat ketegangan ideologis, dan framing yang memusatkan perhatian pada ketimpangan kekuasaan. Pendekatan ini mendukung analisis Fairclough bahwa representasi teks tidak hanya mencerminkan dunia sosial tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengkritik dan menantang dominasi.

Diksi seperti “darurat dinasti politik” dan “tidak meritokrasi” mengimplikasikan ancaman yang mendesak terhadap nilai-nilai demokrasi. Kosakata seperti “prestasi,” “regulasi,” dan “batas kewajaran” menunjukkan tuntutan terhadap reformasi sistem politik yang lebih adil. Representasi ini mencerminkan kritik ideologis terhadap konsentrasi kekuasaan yang merusak prinsip keadilan dan meritokrasi. Menurut Cushion et al. (2021), penggunaan diksi kritis sering kali membingkai isu politik untuk memperlihatkan ketimpangan struktural, menciptakan tekanan sosial terhadap aktor dominan.

Berita ini menyajikan dunia sosial sebagai ruang yang terancam oleh dominasi keluarga Jokowi. Metafora seperti “dikuasai orang-orang tertentu” menciptakan narasi eksklusivitas kekuasaan yang menghalangi partisipasi politik yang inklusif. Representasi ini menunjukkan bagaimana media membangun oposisi ideologis antara kepentingan elit dan prinsip demokrasi. Temuan Wahl-Jorgensen (2020) menguatkan bahwa framing media dapat berfungsi untuk menantang aktor dominan dengan menyoroti akses kekuasaan mereka dan dampaknya terhadap masyarakat.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Relasi dalam Berita 9 melibatkan wartawan, partisipan publik, dan khalayak media, dengan fokus pada kritik terhadap dinasti politik keluarga Presiden Jokowi. Wartawan berperan sebagai penghubung yang menyampaikan pandangan kritis dari narasumber, seperti Ujang Komarudin, kepada khalayak, membingkai dinasti politik sebagai ancaman terhadap demokrasi dan meritokrasi.

Relasi pertama adalah antara wartawan dan partisipan publik, seperti Ujang Komarudin, yang memberikan pernyataan tegas seperti "negeri ini darurat dinasti politik." Narasi ini memperkuat kritik terhadap dinasti politik dengan menekankan dampaknya pada ketimpangan demokrasi. Wartawan mengutip langsung pandangan ini untuk memberikan otoritas pada kritik yang disampaikan.

Relasi kedua adalah antara wartawan dan khalayak, di mana wartawan menyampaikan narasi bahwa dinasti politik menciptakan eksklusivitas kekuasaan. Frasa seperti "dikuasai orang-orang tertentu" memperkuat wacana ini, menggiring pembaca untuk memahami politik dinasti sebagai ancaman sistemik terhadap keadilan politik.

c) Identitas

Dalam Berita 9, identitas yang ditonjolkan mencakup keluarga Presiden Jokowi sebagai simbol dinasti politik, pengamat politik Ujang Komarudin sebagai narasumber kritis, dan wartawan sebagai mediator. Keluarga Jokowi direpresentasikan sebagai aktor dominan yang memperluas pengaruh politik secara sistematis, dengan narasi bahwa dinasti politik mereka menciptakan ketimpangan dalam demokrasi. Ujang Komarudin diberikan identitas sebagai pengamat yang memperingatkan bahaya dinasti politik terhadap meritokrasi dan

keadilan politik melalui pernyataan tegas seperti "darurat dinasti politik." Wartawan, dalam berita ini, berperan sebagai penghubung yang menyoroti isu ini melalui kutipan dan framing kritis, menampilkan dinasti politik sebagai ancaman serius terhadap tata kelola politik yang inklusif. Identitas dalam berita ini memperkuat wacana bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga merusak prinsip dasar demokrasi.

Berita 10

a) Representasi

Representasi dalam konteks analisis wacana kritis Norman Fairclough merujuk pada bagaimana ideologi, pengalaman, dan dunia sosial direpresentasikan melalui teks ini. Berita 10 merepresentasikan dinasti politik sebagai tantangan ideologis terhadap meritokrasi melalui diksi, kosakata, dan metafora yang kritis. Dengan menampilkan politik dinasti sebagai masalah struktural, media menciptakan wacana yang menekan aktor dominan untuk bertanggung jawab. Pendekatan ini mendukung analisis Fairclough bahwa representasi dalam teks tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan menantang relasi kekuasaan.

Diksi seperti "politik dinasti," "tersinyalir," dan "pengadilan rakyat menanti" digunakan untuk membangun narasi yang kritis terhadap konsentrasi kekuasaan. Kosakata ini menunjukkan kritik terhadap praktik dinasti politik, yang dianggap mengabaikan prinsip meritokrasi. Frasa "pengadilan rakyat menanti" merepresentasikan tekanan sosial terhadap kekuasaan yang dianggap melampaui batas demokrasi. Menurut Fowler (2021), pilihan diksi dan kosakata dalam media

seringkali digunakan untuk memperkuat posisi ideologis dan menciptakan oposisi terhadap aktor dominan.

b) Relasi

Relasi mengacu pada siapa saja partisipan yang ditampilkan dalam wacana. Dalam berita ini, adanya relasi kekuasaan antara Jokowi dan putranya, Kaesang. Jokowi digambarkan memiliki otoritas dan pengaruh untuk mengatur jalur karir politik Kaesang, bahkan melalui partai politik PSI. Relasi ini memperlihatkan dinamika kekuasaan dalam politik dinasti, di mana hubungan keluarga menjadi faktor penentu dalam proses politik, menunjukkan adanya jaringan kekuasaan yang terjalin di dalam keluarga Jokowi. Dalam konteks ini, hubungan kekeluargaan berperan penting dalam memperluas pengaruh politik keluarga Jokowi hingga ke tingkat regional, seperti Sumatra Utara. Dinasti politik tersebut tidak hanya melibatkan Jokowi sendiri, tetapi juga keluarganya yang lain, menunjukkan pola dominasi yang meluas di berbagai level politik, dari pusat hingga daerah.

c) Identitas

Identitas dalam hal ini merujuk pada bagaimana identitas dari partisipan yang diperlihatkan dalam teks (Endang, 2010). Dalam Berita 10, identitas yang ditonjolkan meliputi keluarga Presiden Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber, dan wartawan sebagai penghubung wacana. Keluarga Jokowi direpresentasikan sebagai aktor dominan yang memperluas kekuasaan melalui dinasti politik, dengan narasi yang menyoroti pengaruh mereka terhadap sistem politik. Ikrar Nusa Bhakti diberikan identitas sebagai pakar politik yang kritis, dengan pernyataan seperti "dinasti ini akan berlanjut dengan Kaesang dan

istrinya," yang menekankan ancaman dinasti terhadap demokrasi. Wartawan, dalam berita ini, berperan sebagai mediator yang menghubungkan pandangan narasumber dengan khalayak melalui framing kritis, menciptakan wacana bahwa konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga merusak prinsip meritokrasi dan keadilan politik. Identitas dalam berita ini menegaskan dominasi keluarga Jokowi sebagai tantangan struktural terhadap demokrasi.

4.2.2 Analisis Mesostruktural dalam Berita Wacana Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Analisis mesostruktural (*discourse practice*) menurut Fairclough, produksi dan konsumsi teks saling merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini mencakup bagaimana teks digunakan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kekuasaan (Eriyanto, 2015).

a) Produksi Teks

Kompas.com

Wartawan di *Kompas.com* cenderung memiliki latar belakang jurnalistik yang kuat dan berfokus pada independensi. Hal ini terlihat dari pendekatan kritis terhadap dinasti politik Jokowi melalui kutipan langsung dari pakar seperti Ray Rangkuti dan Feri Amsari. Mereka mengangkat narasi tentang ancaman politik dinasti terhadap demokrasi.

Sebagai media arus utama dengan standar editorial tinggi, redaksi *Kompas.com* cenderung memberikan ruang yang cukup bagi pendapat akademis dan kritik mendalam. Fokusnya pada isu politik strategis mencerminkan orientasi institusional media yang mendukung demokrasi dan meritokrasi.

Rutinitas kerja wartawan mencakup pencarian berita dari sumber kredibel, analisis mendalam, hingga penyuntingan yang memastikan teks bersifat kritis namun berimbang. Produksi teks dilakukan secara sistematis, dengan intertekstualitas yang menyambungkan pandangan narasumber dengan dinamika politik terkini.

Tribunnews.com

Wartawan di *Tribunnews.com* memproduksi berita dengan pendekatan yang lebih ringan dan pragmatis. Narasi berfokus pada komentar singkat tokoh seperti Grace Natalie dan Herman Khaeron, tanpa pendalaman analisis. Sebagai media yang berorientasi pasar, struktur organisasi *Tribunnews.com* mendorong wartawan untuk memproduksi teks yang cepat dan mudah diakses oleh khalayak luas. Fokus utama adalah menarik pembaca dengan penyajian yang sederhana dan informative.

Rutinitas kerja lebih menitikberatkan pada wawancara langsung dan penyusunan berita secara cepat. Produksi teks cenderung minim intertekstualitas, mengandalkan komentar langsung tanpa banyak analisis tambahan. Franklin (2019) menjelaskan bahwa media berbasis pasar sering kali mengutamakan aksesibilitas dan kecepatan produksi berita, yang mengorbankan kedalaman analisis dan intertekstualitas. Dalam konteks ini, media cenderung menampilkan komentar langsung dari narasumber tanpa memperkuat narasi dengan data, konteks, atau analisis yang lebih luas.

Detik.com

Wartawan *Detik.com* memadukan pendekatan netral dengan narasi yang ringan. Fokus pada berita politik lokal, seperti dukungan PKS terhadap Bobby

Nasution, menunjukkan sikap yang lebih pragmatis daripada kritis. Sebagai media digital, Detik.com memiliki struktur organisasi yang mendukung kecepatan produksi berita. Hal ini mencerminkan hubungan antara redaksi dan tim pemasaran yang berorientasi pada penyebaran berita secara cepat dan luas. Proses kerja mencakup pengumpulan pernyataan langsung dari narasumber seperti Tifatul Sembiring, kemudian mengolahnya menjadi teks yang informatif namun tidak terlalu analitis. Intertekstualitas terbatas pada penyertaan konteks lokal tanpa banyak referensi tambahan.

Medcom.id

Wartawan *Medcom.id* memiliki pendekatan yang analitis, sering menggunakan pandangan dari pengamat seperti Ujang Komarudin untuk menyoroti isu sistemik dinasti politik. Produksi teks mencerminkan sikap kritis terhadap ketimpangan kekuasaan. Sebagai media yang berorientasi pada analisis mendalam, struktur organisasi Medcom.id mendukung produksi berita dengan perspektif yang lebih kompleks. Redaksi memberikan ruang untuk kritik terhadap isu strategis. Carlson (2020) menjelaskan bahwa media yang berorientasi pada analisis mendalam memainkan peran penting dalam membangun otoritas jurnalistik dengan menyediakan informasi yang berbasis bukti, memperkuat narasi yang mengkritisi struktur kekuasaan.

Rutinitas kerja melibatkan pencarian berita dari narasumber terpercaya, pengolahan data kebijakan, dan analisis regulasi. Intertekstualitas digunakan untuk menghubungkan berbagai komentar narasumber dengan isu kebijakan yang relevan.

b) Konsumsi Teks

Berita-berita yang dianalisis menggunakan portal media daring seperti *Kompas.com*, *TribunNews.com*, *Detik.com*, dan *Medcom.id*, yang memiliki jangkauan audiens luas. Konten-konten berita ini dikonsumsi oleh masyarakat yang aktif dalam mengikuti dinamika politik, terutama menjelang Pilkada 2024. Media ini bertindak sebagai penyedia informasi utama bagi masyarakat dalam memahami isu politik dinasti, yang secara tidak langsung memengaruhi preferensi politik mereka.

Kompas.com menjadi media paling konsisten, menerbitkan lima berita dari Maret hingga Juli 2024 yang mengangkat isu politik dinasti. Narasi yang disampaikan oleh *Kompas.com* lebih mendalam, menggabungkan opini dari pengamat seperti Ray Rangkuti dan Feri Amsari untuk mendukung argumen tentang bahaya dinasti politik. Media ini mengajak pembacanya untuk mempertimbangkan implikasi politik dinasti terhadap demokrasi. Sebaliknya, *TribunNews.com* hanya memuat dua berita pada Maret, dengan fokus pada wawancara singkat dan komentar tokoh politik. Pendekatan ini membuat narasi yang disampaikan terasa lebih ringan dan informatif bagi pembaca yang membutuhkan informasi cepat.

Media seperti *Medcom.id* menggunakan pendekatan intertekstual dalam penulisannya, menghubungkan komentar pengamat dengan kebijakan dan regulasi terkait untuk memperkuat narasi kritis terhadap politik dinasti. Hal ini terlihat dari penggunaan data regulasi seperti perubahan aturan usia minimal calon kepala daerah yang diputuskan Mahkamah Agung. Konsumsi teks ini cenderung menarik audiens yang lebih kritis terhadap konteks hukum dan sosial dari isu yang

diangkat. *Detik.com*, meski hanya memuat satu berita, mengadopsi pendekatan netral dengan memberikan ruang bagi narasi politik lokal yang dikaitkan dengan dukungan partai terhadap Bobby Nasution. Informasi yang disampaikan relevan untuk pembaca yang ingin memahami dinamika strategi politik di tingkat lokal.

Konsumsi teks ini memungkinkan masyarakat untuk membentuk opini tentang legitimasi dinasti politik. Narasi yang mengkritik dinasti politik, seperti yang sering dimuat di *Kompas.com* dan *Medcom.id*, berkontribusi pada persepsi negatif terhadap praktik ini. Sementara itu, berita-berita dari *TribunNews.com* dan *Detik.com* cenderung memberikan informasi tanpa mendorong opini yang spesifik, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan sendiri.

Portal berita *online* ini tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan politik. Dengan menyajikan wacana yang mencakup pandangan pro dan kontra terhadap dinasti politik, media membantu masyarakat untuk menilai calon kepala daerah berdasarkan meritokrasi, regulasi, dan dampaknya terhadap demokrasi. Konsumsi teks ini mendukung literasi politik masyarakat, terutama dalam memahami bagaimana politik dinasti dapat memengaruhi demokrasi.

4.2.3 Analisis Makrostruktural dalam Berita Wacana Politik Dinasti Menjelang Pilkada Serentak 2024

Analisis makrostruktural dalam konteks ini adalah cara untuk memahami bagaimana teks berita terkait wacana politik dinasti dibentuk oleh konteks sosialnya dan bagaimana teks itu sendiri membentuk konteks sosial. Berikut uraian hasil pembahasannya:

a) Situasional

Maret 2024: Awal Munculnya Isu dan Reaksi Keras Publik

Pada bulan Maret, publik mulai memanaskan setelah munculnya wacana pencalonan anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Kaesang Pangarep dan Erina Gudono), serta Bobby Nasution, dalam Pilkada Serentak 2024. Diskusi ini memicu kekhawatiran serius mengenai bahaya dinasti politik terhadap demokrasi di Indonesia.

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, dalam pernyataannya menegaskan bahwa fenomena ini telah mencapai tahap darurat, di mana dinasti politik semakin memperkuat cengkramannya di berbagai wilayah. Kritiknya menyoroti potensi kolusi, nepotisme, dan oligarki yang dapat menggerus sendi-sendi demokrasi. Ia memprediksi, tanpa intervensi tegas, dinasti politik dapat menguasai seperempat wilayah Indonesia pada Pilkada 2024.

Media dan pengamat hukum tata negara, seperti Feri Amsari, juga mengkritik pencalonan ini sebagai tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang dirancang untuk menghindari dominasi kelompok tertentu. Kritik terhadap keluarga Jokowi diperkuat dengan argumen bahwa legitimasi dan kapasitas politik anggota keluarganya dianggap belum teruji, sehingga hanya menambah persepsi negatif terhadap politik dinasti.

Juni 2024: Pergeseran Fokus ke Strategi Politik

Bulan Juni menandai perubahan narasi dari kritik terhadap politik dinasti ke strategi partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan pasangan Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep untuk Pilkada DKI Jakarta. Usulan ini menciptakan kontroversi karena bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi

yang menyatakan keberatannya terhadap pencalonan putra bungsunya di Jakarta. Pengamat politik, Zaki Mubarak, menyebut usulan ini sebagai langkah pragmatis PAN untuk mendapatkan pengaruh Jokowi di masa depan, termasuk dalam penyusunan kabinet. Ia mengkritik PAN yang dulunya dikenal sebagai partai reformis kini berubah menjadi partai oportunis yang lebih mengutamakan kekuasaan dibandingkan idealisme.

Di sisi lain, diskusi publik mulai mengarah pada potensi dampak positif pasangan Ridwan Kamil-Kaesang dalam Pilkada DKI Jakarta. PAN melihat pasangan ini sebagai *game changer* yang bisa meningkatkan daya tarik elektoral mereka di ibu kota.

Juli 2024: Dukungan Masif untuk Bobby Nasution

Bulan Juli menjadi momen penting bagi Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang mendapatkan dukungan luas dari tujuh partai politik besar untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Langkah ini mempertegas persepsi publik bahwa keluarga Jokowi semakin memperluas cengkeraman politiknya di tingkat lokal dan nasional.

Grace Natalie dari PSI membantah tuduhan politik dinasti, menyatakan bahwa dukungan kepada Bobby didasarkan pada elektabilitas dan popularitasnya, bukan karena hubungannya dengan Jokowi. Namun, beberapa tokoh politik seperti Djarot Saiful Hidayat dari PDIP mempertanyakan apakah dukungan ini karena kapasitas pribadi Bobby atau karena posisinya sebagai menantu presiden. Publikasi ini juga memperlihatkan bagaimana partai-partai besar melakukan kalkulasi politik yang cermat sebelum memberikan dukungan. Namun, dukungan

besar untuk Bobby memicu perdebatan baru tentang transparansi dan keadilan dalam pemilihan kepala daerah.

Agustus 2024: Keputusan Kontroversial Mahkamah Agung

Di bulan Agustus, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan kontroversial yang mengubah batas usia minimal bagi calon kepala daerah. Putusan ini membuka peluang bagi Kaesang Pangarep, yang saat itu belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan KPU, untuk mencalonkan diri.

Peneliti dari ICW, Seira Tamara, mengkritik keputusan ini sebagai langkah yang memberikan "karpet merah" bagi dinasti politik Jokowi. Ia juga menyoroti proses cepat dalam pengambilan keputusan MA, yang hanya memakan waktu tiga hari, sebagai indikasi kurangnya deliberasi yang matang. Keputusan ini dianggap menguntungkan Kaesang, karena tanpa perubahan aturan tersebut, ia tidak akan memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024. Kritik publik terhadap MA semakin meningkat karena keputusan ini dinilai tidak berdasar dan mengintervensi regulasi pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan KPU.

b) Institusional

Pemerintah: Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

Pada tingkat institusional, lembaga pemerintah seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran kunci dalam menciptakan landasan hukum yang dapat mengakomodasi atau membatasi dinasti politik. Selanjutnya, MA mendapat sorotan tajam karena keputusannya yang kontroversial pada Agustus 2024. Keputusan ini mengubah aturan usia minimum calon kepala daerah sehingga memungkinkan

Kaesang Pangarep maju di Pilkada meskipun secara usia tidak memenuhi syarat awal. Kritik utama datang dari ICW, yang menyebut keputusan ini sebagai "karpet merah" bagi dinasti Jokowi. Proses pengambilan keputusan yang hanya tiga hari menunjukkan kurangnya deliberasi yang memadai, memperkuat dugaan intervensi politik.

Keputusan MA ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi lembaga hukum. Sebagai lembaga negara, MA seharusnya menjadi penegak keadilan yang tidak berpihak, namun tindakan mereka menimbulkan persepsi publik bahwa keputusan ini diarahkan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, MA berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai alat legitimasi bagi dinasti politik. Kemudian, komisi pemilihan umum (KPU) sebagai institusi yang bertugas memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, menghadapi tantangan besar dalam menjaga independensi di tengah tekanan politik. Keputusan MA yang bertentangan dengan regulasi KPU sebelumnya tentang usia minimal calon kepala daerah menjadi ujian serius bagi kredibilitas lembaga ini. KPU harus menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga aturan tanpa terpengaruh oleh keputusan instansi lain yang dianggap memiliki agenda politik. Peran MK sebelumnya, seperti perubahan aturan syarat pencalonan yang memungkinkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden, juga menjadi bagian dari dinamika politik dinasti ini. MK dianggap sebagai lembaga yang memberikan ruang bagi dinasti politik melalui penafsiran hukum yang fleksibel. Hal ini memperlihatkan bahwa institusi pemerintah tidak sepenuhnya netral dan dapat digunakan sebagai alat politik.

Partai Politik: Strategi dan Oportunisme Kekuasaan

Partai politik berperan sebagai motor penggerak dalam proses dinasti politik dengan mendukung anggota keluarga Jokowi dalam kontestasi politik. PAN, melalui usulan duet Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep untuk Pilkada DKI Jakarta, menunjukkan pragmatisme politik. Usulan ini dinilai sebagai upaya PAN untuk menarik perhatian Jokowi demi keuntungan strategis di masa depan, termasuk dalam penyusunan cabinet. Zaki Mubarak menyebut PAN sebagai partai yang kehilangan idealisme reformasinya, kini lebih mengutamakan kalkulasi kekuasaan dibandingkan dengan prinsip demokrasi.. Selanjutnya, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik besar, termasuk PKB, Golkar, Gerindra, dan Demokrat, untuk maju sebagai calon gubernur Sumatra Utara. Hal ini menunjukkan bahwa parpol menggunakan kalkulasi politik berbasis elektabilitas untuk menentukan dukungannya. Meski demikian, langkah ini mendapat kritik dari tokoh seperti Djarot Saiful Hidayat, yang mempertanyakan apakah dukungan itu diberikan karena kapasitas Bobby atau karena posisinya sebagai menantu presiden.

LSM dan Pengamat: Kritik terhadap Dinasti Politik

LSM dan pengamat politik memainkan peran penting dalam memberikan kritik terhadap dinasti politik dan implikasinya bagi demokrasi. ICW dengan tegas mengkritik keputusan MA sebagai langkah yang memperkuat dinasti Jokowi. Dalam pernyataannya, ICW menyebut keputusan ini sebagai preseden buruk yang memperlihatkan bagaimana lembaga hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. ICW juga menunjukkan kegagalan dalam proses hukum

yang cepat, menunjukkan bahwa kepentingan politik telah mendominasi deliberasi hukum.

Pengamat seperti Ray Rangkuti dan Zaki Mubarak menyuarakan keprihatinan mereka terhadap bahaya dinasti politik yang mengarah pada oligarki. Menurut mereka, konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga akan mengurangi transparansi dan mengancam meritokrasi dalam sistem politik. Kritik ini juga menggarisbawahi bahwa dinasti politik merusak prinsip demokrasi dengan menciptakan ketergantungan pada hubungan kekeluargaan, bukan kapasitas dan integritas individu.

c) Sosial

Isu politik dinasti menciptakan polarisasi di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa praktik ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi karena memperkuat oligarki dan meminggirkan prinsip meritokrasi. Sebaliknya, pendukung politik dinasti menganggap bahwa pencalonan anak atau menantu Jokowi sah-sah saja selama mereka dipilih secara demokratis. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa masyarakat terpecah dalam menilai legitimasi politik dinasti di tengah konteks sosial yang semakin terpolarisasi.

Keputusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Publik mencurigai bahwa keputusan seperti perubahan batas usia calon kepala daerah lebih berpihak kepada kepentingan politik tertentu, khususnya keluarga Presiden Jokowi. Tekanan sosial terhadap lembaga hukum ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap transparansi dan independensi institusi pemerintah dalam menangani isu-isu strategis.

Media berperan penting dalam membentuk opini masyarakat terhadap politik dinasti. Berita-berita yang menyoroti hubungan keluarga Jokowi dengan pencalonan politik memberikan tekanan sosial terhadap dinasti tersebut. Sebagian media, seperti Kompas dan Tribun, secara eksplisit memuat kritik terhadap praktik dinasti ini, sementara media lain mencoba menampilkan sudut pandang yang netral. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat dipengaruhi oleh narasi yang dibangun oleh media terkait legitimasi politik dinasti.

Meski ada kritik tajam, sebagian masyarakat menunjukkan dukungan kepada kandidat dari keluarga Jokowi, terutama karena popularitas mereka. Dalam kasus Bobby Nasution, misalnya, dukungan terhadapnya tidak hanya datang dari partai politik tetapi juga dari masyarakat yang melihat Bobby sebagai figur yang mampu melanjutkan program pemerintah. Ini menandakan bahwa popularitas dan afiliasi politik dapat mengatasi skeptisisme terhadap politik dinasti di kalangan tertentu.